



► PEMBEBASAN PBB P2 LP2B

PAD Puluhan Miliar Rupiah Berpotensi Melayang

BANTUL—Pembekab Bantul bakal membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk lebih dari 12.000 hektare lahan pertanian produktif pada tahun depan. Akibatnya, Bantul berpotensi kehilangan pendapatan daerah hingga puluhan miliar rupiah.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

► Program pembebasan PBB P2 menasar 12.831 hektare LP2B.

► Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul kini tengah melakukan kajian lapangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo mengatakan kebijakan ini digulirkan sebagai upaya mencegah alih fungsi lahan, meringankan beban petani,

dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dia menjelaskan program itu menasar 12.831 hektare lahan yang telah masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B).

Hingga kini, kata dia, pendataan sekarang masih terus dilakukan. "Terbanyak ada di Kapanewon Bambanglipuro, Kretek, Imogiri, Jetis, Pandak, Sanden, hingga Srandakan," ujarnya, Rabu (18/6).

Agar program tepat sasaran, Joko menekankan pentingnya peran kepala dukuh untuk mendata ulang lahan pertanian di wilayah masing-masing. Pasalnya, tak sedikit lahan yang sudah beralih fungsi menjadi permukiman atau bangunan komersial lainnya. "Kalau sudah beralih fungsi tentu tidak akan mendapatkan pembebasan PBB P2," ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Anggit Nur Hidayah membenarkan proses pendataan

lahan yang akan dibebaskan dari PBB P2 saat ini masih berlangsung.

Data sementara menunjukkan luas lahan pertanian dalam daftar PBB P2 mencapai 13.771 hektare dengan potensi penerimaan pajak sekitar Rp21 miliar. "Data ini sedang kami verifikasi dengan data LP2B. Jika tidak masuk LP2B, maka tidak dibebaskan," ucap Anggit.

Kajian Lapangan

Sementara, Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul, Desiana Tri Wahyuni menyebut regulasi perlindungan LP2B telah ditetapkan melalui Perda No.10/2023.

"Dalam perda itu ditetapkan luas kawasan LP2B 12.831 hektare, serta cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 5.942 hektare," ujarnya.

Namun, dia mengingatkan bahwa kondisi *existing* di lapangan belum tentu sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul kini tengah melakukan kajian lapangan.